

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)

Erina Setiana Putri¹, Nur Ika Mauliyah^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Jl. Mataram No. 1 Jember, Indonesia

*Korespondensi: nurikamauliyah@uinkhas.ac.id

Abstract

Capital expenditure is one of the regional expenditures that needs to be taken into account in the development of sustainable infrastructure and facilities. The existence of regional revenues consisting of PAD, DAU, and DAK which are used to improve public services through public facilities will be able to increase capital expenditure so that economic growth will also increase. This study aims to determine the effect of economic growth, local revenue, general allocation funds, and special allocation funds on the allocation of capital expenditures. This research uses a quantitative research approach with descriptive research types. The population in this study are 38 districts/cities in East Java Province. The sampling method in this study used saturated sampling method, the number of samples used in this study was 114 (38 x 3). Data collection techniques and instruments in this research are literature studies and documentary studies. The data analysis used was descriptive statistics, classical assumption test, simple and multiple linear regression hypothesis testing with the help of the SPSS program. The results of this study can be concluded that: economic growth has a negative and significant effect on the allocation of the Capital Expenditure budget while PAD, DAU, and DAK partially have a positive and significant effect on the allocation of the Capital Expenditure budget. The variables of economic growth, PAD, DAU, and DAK simultaneously have a significant effect on capital expenditure.

Keywords: Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

Abstrak

Belanja modal merupakan salah satu dari pengeluaran daerah yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur serta fasilitas yang berkelanjutan. Adanya penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui fasilitas umum yang akan mampu meningkatkan belanja modal sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai metode *sampling jenuh*, jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 114 (38 x 3). Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan studi pustaka dan studi dokumenter. Analisis data yang dipakai yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis regresi linier sederhana dan berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal sedangkan PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena prinsip dasar otonomi yaitu otonomi yang merata, realistis dan bertanggung jawab, maka diharapkan mempertimbangkan aspek demokrasi, partisipasi, dan keadilan dengan tetap memperhatikan keragaman dan potensi daerahnya. Adanya kebijakan otonomi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari otonomi dan kebijakan pembangunan nasional seperti yang dituntut pada masa reformasi bergulir. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memprioritaskan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan rakyat hingga ke wilayah pelosok, baik dari segi nilai atau keunggulan.

Kunci kesuksesan pelaksanaan otonomi adalah pendapatan fiskal daerah yang cukup untuk menyediakan pendanaan dalam mewujudkan otonomi daerah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan misi pemerintahan, kebijakan layanan publik, serta pembangunan.

Anggaran daerah yaitu rencana keuangan yang dijadikan sebagai landasan dalam pemberian layanan dan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah daerah. Di Indonesia, laporan rancangan anggaran daerah dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu provinsi, kabupaten atau kota. APBD mencerminkan kebutuhan rakyat dengan mempertimbangkan sumber kekayaan dan potensi yang ada di daerah (Faradilla Herlin et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Susunan APBD diantaranya yaitu 1) pendapatan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan, 2) belanja daerah, 3) pembiayaan daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus ikut berpartisipasi dalam membangun perekonomian dengan mengelola sumber daya dan potensi, menjalin hubungan dengan penduduk setempat, dan membentuk lapangan kerja baru yang berdampak pada kemajuan kegiatan perekonomian lokal. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan belanja modal meskipun terkadang tidak terlalu signifikan. Selain itu pertumbuhan ekonomi menentukan seberapa besar tambahan yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian bagi penduduk selama periode waktu tertentu. Karena pada dasarnya, kegiatan ekonomi merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menciptakan aliran imbalan bagi faktor-faktor produksi milik penduduk. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan penduduk yang memiliki faktor produksi diharapkan akan meningkat (Patta Rapanna & Zulfikry Sukarno SE, 2017).

Desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah kewenangan yang besar untuk menggali potensinya sebagai pendapatan guna menangani kebutuhan daerah salah satunya menyediakan layanan masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu jenis pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Adanya desentralisasi fiskal, diharapkan akan meningkatkan pelayanan di beberapa bidang, khususnya di sektor publik. Meningkatnya pelayanan publik, seharusnya mampu membuat daerah lebih menarik bagi para investor untuk mendirikan perusahaan di kawasan tersebut. Tentunya harapan ini dapat terpenuhi apabila pemerintah berupaya memberikan kemudahan dalam investasi. Namun, setiap daerah memiliki kemampuan

keuangan yang berbeda-beda untuk membiayai programnya, sehingga menyebabkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengurangi ketimpangan keuangan baik secara horizontal maupun vertikal, pemerintah pusat mentransfer dana dari APBN sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menurut Dito Ganinduto, RUU HKPD berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah dan juga akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kemandirian daerah dan pemerataan pelayanan publik yang memadai. Transfer dana yang diperoleh diharapkan dapat memungkinkan pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan PAD dalam mendanai anggaran belanja modal di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak akan terus menerus mengandalkan dana transfer yang diberikan karena belum optimalnya PAD.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat (71), dana alokasi umum merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dari penjelasan tersebut disimpulkan DAU sebagai alat untuk menangani ketidakseimbangan antar daerah, tetapi juga menjadi sumber pendanaan bagi daerah. Sementara itu, pemerintah daerah juga diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat dengan pen delegasian dana, fasilitas, serta SDM. Dana tersebut akan disetorkan dalam wujud dana transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Khusus. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat (72), dana alokasi khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Belanja modal sebagai bagian dari pengeluaran daerah yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang berkelanjutan. Menurut Halim, Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode anggaran serta dapat menaikan aset / kekayaan daerah sehingga akan mengakibatkan pengeluaran rutin bertambah seperti biaya pemeliharaan untuk mempertahankan masa manfaat dan meningkatkan kualitas aset (Sudaryo et al., 2021). Belanja modal yang rendah membuat kinerja berbagai instansi pemerintah juga menurun. Di sisi lain, belanja modal juga memainkan peran penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penanda kesuksesan pencapaian pembangunan ekonomi sehingga diperlukannya investasi pemerintah dalam mengucurkan anggaran.

Pergeseran komposisi belanja menjadi langkah logis yang bisa dipakai pemerintah daerah untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Pergeseran tersebut bermaksud untuk peningkatan investasi dengan wujud aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, gedung serta aset tetap lain. Karena persyarat utama pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik adalah aset tetap yang didapat melalui belanja modal. Semakin besar jumlah investasi yang diberikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, semakin besar pula ketersediaan yang diharapkan. Pembangunan sarana dan prasarana yang baik mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai macam bidang serta dapat meningkatkan produktivitas penduduk. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui prosedur kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang.

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk mencapai 40,67 juta jiwa menurut sensus penduduk pada tahun 2020 dengan luas wilayah 47. 803, 49 km². Maka tidak heran jika Jawa Timur memiliki banyak wilayah perkotaan atau urban. Jawa Timur memiliki beberapa sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian, industri manufaktur, perdagangan, hotel, dan restoran. Meskipun masih dalam suasana pandemi covid-19, realisasi penerimaan APBD Jawa Timur tahun 2021 menduduki peringkat kesatu nasional yaitu mencapai 103,97% dari sasaran pemasukan sebesar Rp. 32,9 triliun, hingga tanggal 31 Desember 2021 telah direalisasikan Rp. 34,2 triliun. Untuk peringkat kedua diduduki Provinsi Gorontalo dengan persentase sebesar 102,28%, sedangkan untuk peringkat ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa

Barat dengan persentase sebesar 102,07%. Dengan rincian realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :

Tabel 1. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

| Uraian | Pagu | Realisasi | Persentase (%) |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| PAD | Rp. 17,1 triliun | Rp. 18,9 triliun | 110,50% |
| A. Pajak Daerah | Rp. 14,2 triliun | Rp. 15,4 triliun | 108,25% |
| B. Retribusi Daerah | Rp. 110,3 miliar | Rp.110,6 miliar | 100,33% |
| C. Hasil Kekayaan Daerah | Rp. 404,5 miliar | Rp.408,6 miliar | 101,03% |
| D. Lain-lain PAD | Rp. 2,3 triliun | Rp. 3 triliun | 126,45% |
| Pendapatan Transfer | Rp. 15,6 triliun | Rp. 15,1 triliun | 97,12% |
| Lain-lain Pendapatan Daerah | Rp. 200,2 miliar | Rp. 151 miliar | 75,45% |
| Belanja Daerah | Rp. 36,6 triliun | Rp. 33,7 triliun | 92,14 % |

Sumber: data diolah peneliti

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Pohan (2018) membuktikan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini sependapat dengan penelitian Hanjelin Novianti dan Sri Rahayu yang membuktikan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Di sisi lain, hasil penelitian Siregar & Zebua (2022) membuktikan bahwa secara parsial hanya variabel pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berbeda dengan penelitian Lutpikah & Mahendra (2020) yang membuktikan bahwa hanya variabel dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan itu, judul penelitian ini merupakan: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020)”**.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Pendekatan kuantitatif didefinisikan sebagai metode pendekatan yang didasarkan pada filsafat positivisme, filsafat positivisme memandang fenomena dalam penelitian dapat dikategorikan, relatif tepat, konkret, dapat diamati, dan dapat diukur hubungan sebab akibat. Penelitian deskriptif kuantitatif diimplementasikan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang fenomena tersebut dengan memakai tahapan-tahapan pendekatan kuantitatif (Ratna Wijayanti, 2021).

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 38 pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel memakai teknik *sampling jenuh* yaitu metode pengambilan sampel dengan memakai seluruh anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel (TEGOR et al., 2020). Penelitian ini memakai data pada tahun 2018-2020, dengan jumlah populasi 38 daerah. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu $3 \times 38 = 114$.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumenter. Sedangkan untuk sumber datanya memakai data sekunder, sumber data pada skripsi ini diperoleh dari Laporan Realisasi APBD 2018-2020 yang diambil dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Melalui Internet dan Badan Pusat Statistik untuk data pertumbuhan ekonomi.

Analisis data menurut Sugiyono, diartikan sebagai proses pengorganisasian, pengelolaan, dan penggalian hal penting dari data yang didapat pada objek, dan menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Sedangkan menurut Didas, Analisis data mengelola data yang didapat dengan menggabungkan variabel penelitian dan menyederhanakan pemahaman struktural yang dipahami oleh semua pihak (Elidawaty Purba dkk, 2021). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi (1) Uji normalitas, (2) Uji multikolonieritas, (3) Uji heteroskedastisitas, dan (4) uji autokolerasi. Setelah melakukan uji asumsi kelasik tahap selanjutnya memakai uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum data dipakai untuk diolah peneliti melakukan *screening* data hal ini dilakukan untuk melihat data yang dipakai berdistribusi normal. Setelah dilakukan *screening* data, dapat diketahui bahwa data dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Sehingga peneliti melakukan transformasi data yaitu mengubah skala pengukuran data asli dalam bentuk lain, agar data dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam uji pra syarat (uji asumsi klasik) sebelum masuk ke analisis regresi.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, jumlah, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Data yang dipakai dalam penelitian disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statisticss

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Pertumbuhan_Ekonomi | 114 | 1,00 | 3,74 | 2,0602 | ,85028 |
| PAD | 114 | 11,63 | 73,36 | 20,1089 | 10,11734 |
| DAU | 114 | 19,34 | 42,23 | 30,3519 | 5,14498 |
| DAK | 114 | 7,71 | 24,41 | 16,6772 | 3,94641 |
| Belanja_Modal | 114 | 8,73 | 52,48 | 19,0601 | 6,80718 |
| Valid N (listwise) | 114 | | | | |

Sumber: *Output* SPSS, diolah Penulis 2022

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis dengan memakai analisis regresi linier sederhana dan berganda, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi :

a) Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|-----------------------------|------|-------------------------|
| Test Statistics | | ,096 |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | ,233 ^d |

Sumber: *Output* SPSS, diolah Penulis,2022

Hasil pengolahan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Test Statistics K-S memiliki nilai sebesar 0,096 dengan signifikan 0,233 lebih besar dari sig- α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

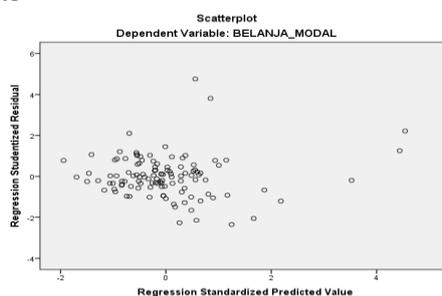
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|---------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Pertumbuhan_Ekonomi | ,988 | 1,012 |
| PAD | ,794 | 1,259 |
| DAU | ,107 | 9,388 |
| DAK | ,112 | 8,934 |

Sumber: *Output* SPSS, diolah Penulis,2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai tolerance lebih besar dibandingkan dengan 0,10 dan nilai VIF variabel berada disekitar angka 1-10. Sehingga hasil perhitungan ini memenuhi syarat uji multikolinearitas yakni jika nilai tolerance $\geq 0,10$, berarti tidak ada masalah multikolinearitas. Nilai VIF disekitar angka 1-10, membuktikan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini tidak mengandung indikasi multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Grafik Scatterplot

Sumber : *Output* SPSS, diolah Penulis,2022

Pada grafik *scatterplot* di atas dapat diketahui bahwa titik distribusi berdistribusi secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

| Model | Durbin-Watson |
|-------|---------------|
| 1 | 2,124 |

Sumber : *Output* SPSS, diolah Penulis,2022

Berdasarkan pada tabel Durbin-Watson di atas dengan tingkat nilai signifikansi 5%, total data yang dipakai ($n=114$), dan total variabel independen 4 ($k=4$). Diperoleh nilai untuk batas atas (dU) yaitu 1,7677 dan untuk batas bawah (dL) sebesar 1,6227. Dikarenakan nilai Durbin-Watson (d) 2,124 lebih besar dari batas atas (dU) 1,7438, dan $(4-2,124) > 1,7438$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

3. Uji Hipotesis

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Melalui analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah dimana nilai $t_{hitung} -2,644 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai

signifikan sebesar 0,009. Nilai ini lebih kecil dibandingkan 0,05 ($0,009 < 0,05$). Nilai koefisien regresi adalah -1,941, memiliki arti bahwa jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka sebaliknya belanja modal mengalami penurunan 1,941 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Nilai koefisien determinan ($R^2_{x_1 y}$) sebesar 0,050 berarti 5% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya 95% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Nilai koefisien pada penjelasan di atas bernilai negatif yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka belanja modal mengalami penurunan begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat juga diartikan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi penduduk membuat pembiayaan dalam pengalokasian anggaran belanja modal menurun.

Tabel 6. Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pertumbuhan Ekonomi

| Variabel | Koefisien Regresi | $R^2_{x_1 y}$ | Sig | t_{hitung} | Keterangan |
|---------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|
| Konstanta | 23,058 | | 0,000 | 14,106 | |
| Pertumbuhan Ekonomi | -1,941 | 0,050 | 0,009 | -2,644 | Signifikan |

Sumber: *Output SPSS*, diolah Penulis, 2022

Untuk meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah harus mendistribusikan dana ke APBD dalam wujud anggaran belanja modal. Anggaran belanja modal dilandaskan pada kebutuhan daerah akan fasilitas, yaitu kebutuhan daerah untuk keberhasilan pelaksanaan misi pemerintah dan pelayanan publik. Supaya dapat meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah perlu menggeser komposisi belanja daerah. Sebab pengeluaran daerah selama ini cenderung dipakai untuk pengeluaran rutin yang kurang efektif terlebih karena adanya pandemi covid-19 mengharuskan pemerintah untuk lebih banyak mengeluarkan anggaran belanja daerahnya untuk menangani covid-19.

Menurut Astera Prima Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam webinar *Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD*, beliau mengatakan bahwa belanja infrastruktur atau belanja modal terbilang masih rendah sekitar 11% jika dibandingkan dengan belanja pegawai. Karena sekitar 34-64% dana yang diberikan pemerintah pusat dipakai untuk belanja pegawai.

Pelaksanaan belanja modal sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Peningkatan anggaran belanja modal dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya kepercayaan penduduk terhadap pemerintah daerah. Dengan meningkatkan belanja modal dalam wujud konstruksi, irigasi, jalan, infrastruktur, dan lain-lain dapat meningkatkan pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung kepada penduduknya dibandingkan dengan belanja rutin. Sehingga dapat dikatakan, apabila nilai belanja modal dan belanja barang dan jasa rendah maka akan semakin buruk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasin Belanja Modal

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel PAD

| Variabel | Koefisien Regresi | $R^2_{x_2 y}$ | Sig | t_{hitung} | Keterangan |
|-----------|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|
| Konstanta | 8,036 | | 0,000 | 9,694 | |
| PAD | 0,548 | 0,661 | 0,000 | 14,875 | Signifikan |

Sumber: *Output SPSS*, diolah Penulis, 2022

Melalui analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 14,875 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi adalah 0,548, artinya setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka belanja modal akan ikut meningkat sebesar 0,548 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Koefisien determinan ($R^2 x_2 y$) sebesar 0,661 berarti 66,1% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel PAD sedangkan sisanya 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Koefisien bernilai positif artinya dengan meningkatnya PAD maka belanja modal juga meningkat dan begitu juga sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi PAD maka alokasi anggaran pada belanja modal akan semakin tinggi pula. Selain itu, belanja modal yang dibiayai PAD akan mengurangi pos anggaran lainnya.

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan dari sumber dana yang digunakan untuk mendanai belanja modal. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari kontribusi pajak, retribusi daerah, kinerja usaha daerah, kinerja administrasi dan aset daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik yang berkualitas, yang dapat diwujudkan melalui belanja modal. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah akan mampu membiayai sendiri pengeluarannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat, dengan kata lain pemerintah daerah dapat mandiri terhadap manajemen keuangan daerahnya yang bersifat transparansi dan akuntabel.

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasin Belanja Modal.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel DAU

| Variabel | Koefisien Regresi | $R^2 x_3 y$ | Sig | t_{hitung} | Keterangan |
|-----------|-------------------|-------------|-------|--------------|------------|
| Konstanta | -4,595 | | 0,142 | -1,478 | |
| DAU | 0,779 | 0,341 | 0,000 | 7,714 | Signifikan |

Sumber: *Output SPSS*, diolah Penulis,2022

Melalui analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 7,714 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi adalah 0,779, artinya setiap kenaikan DAU sebesar 1% maka belanja modal akan ikut meningkat sebesar 0,779 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2 x_3 y$) sebesar 0,341 berarti 34,1% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel DAU sedangkan sisanya 65,9% dipengaruhi oleh variabel independen lain.

Koefisien bernilai positif, dengan kata lain ketika DAU meningkat belanja modal juga meningkat dan sebaliknya. Ini menjelaskan bahwa dana transfer DAU yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan mengakibatkan pengembangan alokasi belanja modal, dan juga mendukung pos pendapatan alokasi belanja daerah.

Pemerintahan daerah otonom memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DAU yaitu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dan untuk mendanai kebutuhan daerah terkait dengan desentralisasi.

d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasin Belanja Modal.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel DAK

| Variabel | Koefisien Regresi | $R^2 x_4 y$ | Sig | t_{hitung} | Keterangan |
|-----------|-------------------|-------------|-------|--------------|------------|
| Konstanta | 2,189 | | 0,335 | 0,968 | |
| DAK | 1,012 | 0,338 | 0,000 | 7,663 | Signifikan |

Sumber: *Output SPSS*, diolah Penulis,2022

Melalui analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa H4 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat

dilihat dari nilai $t_{hitung} 7,663 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi adalah 1,012, artinya setiap kenaikan DAK sebesar 1% maka belanja modal akan ikut meningkat sebesar 1,012 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2 x_4 y$) sebesar 0,338 berarti 33,8% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel DAK sedangkan sisanya 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Koefisien bernilai positif, dengan kata lain ketika DAK meningkatnya belanja modal meningkat dan sebaliknya. Ini menjelaskan bahwa dana transfer berupa DAK yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal dan mendukung pos pendapatan dalam alokasi belanja daerahnya.

Adanya alokasi DAK yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal mengakibatkan pelayanan publik semakin meningkat, karena DAK lebih condong menambah aset tetap dimiliki pemerintah. Penggunaan DAK meliputi pemberian dukungan fasilitas fisik untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, pengadaan dan perbaikan fasilitas jangka panjang untuk mendukung sarana dan prasarana fisik berupa penyediaan infrastruktur. Sesuai dengan tujuan utama DAK untuk pembiayaan layanan dasar bagi masyarakat yang tidak memenuhi standar termasuk ketentuan untuk mendukung standar atau mendorong percepatan pembangunan masyarakat.

e. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Variabel | Koefisien Regresi | $R^2 x_4 y$ | Sig | F_{hitung} | Keterangan |
|---------------------|-------------------|-------------|-------|--------------|------------|
| Konstanta | 6,657 | 0,778 | 0,000 | 100,188 | Signifikan |
| Pertumbuhan Ekonomi | -1,673 | | | | |
| PAD | 0,470 | | | | |
| DAU | -0,209 | | | | |
| DAK | 0,764 | | | | |

Sumber: *Output* SPSS, diolah Penulis, 2022

Hasil dari uji statistik F membuktikan bahwa semua variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} 100,188 lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} ($100,188 > 2,68$) dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Serta nilai koefisien determinan sebesar 0,778 berarti 77,8% variasi belanja modal dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK sedangkan sisanya 22,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut: Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Variabel Dana Alokasi Umum (X3) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Variabel Dana Alokasi Khusus (X4) secara parsial memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun

2018-2020. Variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Penggunaan anggaran belanja modal harus dipakai untuk hal-hal produktif seperti menyediakan pembangunan infrastruktur, irigasi, jalan dan lain-lain yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat dibandingkan dengan belanja rutin. Alokasi yang tepat sasaran dan standar yang tinggi sehingga dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang perlu adanya peningkatan untuk memenuhi beberapa biaya pemeliharaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin mandiri secara keuangan daerah tersebut dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan menyediakan layanan untuk masyarakat. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat digunakan secara tepat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti tidak hanya mengambil data penelitian dari salah satu website saja namun juga menggunakan website lainnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Selain itu, peneliti juga harus menghitung kembali data tersebut sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan supaya data tersebut lebih akurat dan terpercaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Faradilla Herlin, S. E., Ratih Rosita, S. E., & M E, H. B. (2021). *KEUANGAN DAERAH*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL*, 5(2), 147-158.
- Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *EKONOMI PEMBANGUNAN* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Pohan, A. L. H. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Siregar, O. K., & Zebua, B. A. (2022). PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS BERPENGARUH TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS 10 PEMERINTAHAN KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA). *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, press-press.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- TEGOR, S. E., ALPINO SUSANTO, S. P., TOGATOROP, V., SULIVYO, L. O. D., SE, M. M., Siswanto, L. C. Z. I. D. J., & SE, M. I. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Penerbit Lakeisha.